

RANCANGAN

CATATAN RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI DENGAN ASRENA POLRI DAN KPK RI

(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: V
Rapat ke	:
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Hari/tanggal	: Kamis, 5 Juli 2018.
Waktu	: Pukul 14.35 – 15.45 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III DPR RI.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Asrena Polri dan KPK RI dibuka pukul 14.35 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III, Erma Suryani Ranik, SH dengan agenda rapat membahas mengenai :

- Pembahasan Realisasi Anggaran 2018, Pagu Indikatif 2019 dan penjelasan permintaan penambahan anggaran mitra kerja.
- Tanya/Jawab;
- Kesimpulan/Penutup

II. POKOK POKOK PEMBAHASAN

1. Beberapa hal yang disampaikan oleh Asrena Polri, diantaranya adalah sebagai berikut :
 - Realisasi 2017 sebesar 94,5% atau 93,994 Trilyun dari Pagu 99,449 Trilyun
 - Realisasi anggaran 2018 sampai dengan bulan Juni sebesar 39,9% dari pagu 96,5 Trilyun
 - Bahwa Polri telah mengusulkan kebutuhan anggaran kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bapenas melalui Surat Kapolri Nomor : B/1563/III/Ren.2.1/2018 tanggal 14 Maret 2018 sebesar Rp. 126,8 Triliun yang terdiri atas :
 - Belanja Pegawai Rp. 49,9 Triliun;
 - Belanja Barang Rp. 36,5 Triliun (termasuk kebutuhan anggaran pengamanan Pemilu 2019 sebesar Rp. 5 Triliun); dan
 - Belanja Modal Rp. 40,3 Triliun

- Bahwa sesuai dengan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor : S-269/MK.02/2018 dan Nomor : B.209/M.PPN/D.8/KU.01.01/04/2018 tanggal 16 April 2018 perihal Pagu Indikatif K/L Tahun 2019, telah ditetapkan Pagu Indikatif Polri T.A. 2019 sebesar Rp. 76,9 triliun, termasuk kebutuhan anggaran untuk pengamanan Pemilu sebesar Rp. 2,3 triliun.
- Penetapan Pagu indikatif tersebut bila dilihat dari usulan Polri maka terpenuhi 60,62%, sedangkan bila dibandingkan dengan Alokasi Anggaran T.A. 2018 sebesar Rp. 95,0 triliun maka secara umum berkurang sebesar Rp. 18,1 triliun atau minus 19,08%.
- Bahwa Polri telah mengusulkan tambahan anggaran pada penetapan Pagu Anggaran T.A. 2019 kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas dalam pembahasan/dokumen hasil rapat bersama (Trilateral Meeting) sebesar Rp. 44,4 triliun dengan rincian :
 - Belanja Pegawai Rp. 6,7 Triliun; (Penyesuaian Tunkin 70%, pemenuhan kebutuhan peningkatan type satker/Satwil
 - Belanja Barang Rp. 5 triliun (Pengamanan Pemilu 2,780 T, Harwat 735 M, BMP 1.015 Trilyun, Katkan Kinerja Fungsi Lidik Sidik terutama penguatan Densus 88 sebesar 532 Milyar
 - Belanja Modal Rp. 32,6 Triliun (Pembangunan Mako, Rumdin, Fasilitas pendukung, pemenuhan Almatsus)
- Polri juga mengusulkan adanya penyesuaian berupa pengurangan alokasi Pagu indikatif untuk sumber anggaran PNBPN yang telah ditetapkan sebesar Rp. 8,9 triliun menjadi sebesar Rp. 8,4 triliun (berkurang Rp. 418 miliar) mengingat pada saat penyusunan proposal target PNBPN T.A. 2019 Polri masih memperhitungkan penerimaan target PNBPN Fungsional dari jenis Pengesahan STNK (sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016). Namun dengan adanya Keputusan MA Nomor 12 P/Hum/2017 tanggal 14 Juni 2017 tentang Pencabutan Lampiran Nomor e (pengesahan STNK) pada PP Nomor 60 Tahun 2016, maka Penerimaan PNBPN Polri dari Pengesahan STNK dihentikan sehingga berpengaruh pada berkurangnya rencana target dan Pagu penggunaan PNBPN Polri T.A. 2019. Pengurangan ini telah diusulkan kepada Kementerian Keuangan sesuai dengan Surat Kapolri Nomor : B/2717/V/Ren.4.2/2018/Srena tanggal 8 Mei 2018.

2. Beberapa hal yang disampaikan oleh KPK, diantaranya adalah sebagai berikut :

- Realisasi Anggaran T.A. 2017 sebesar 92,67%
- Kinerja penindakan TPK 2017
 - Penyelidikan 123, Penyidikan 121, penuntutan 103, eksekusi 83
- Kinerja Pencegahan 2017 :
 - Pelatihan teknis audit investigasi pengadaan (1200 APiP)
 - Pendampingan Pemda (23 Provinsi) untuk perijinan satu pintu, e-planning dan e-budgetting
 - e-procurement
- Tahun 2018 KPK mendapat Pagu 790,2 M, dengan penyerapan sampai bulan Juni sebesar 45%.
- Berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor: S-269/ MK.02/ 2018 dan

B.209/ M.PPN/ D.8/ KU.01.01/ 04/ 2018 tanggal 16 April 2018 hal Pagu Indikatif K/L Tahun 2019 sebesar Rp 813,45 M

- KPK masih kekurangan dana Rp.72 Milyar karena ada penambahan pegawai, meminta program pemberantasan Tipikor anggarannya dinaikkan agar performa KPK meningkat
- Usulan Penambahan Anggaran TA. 2019 Pembahasan Trilateral Meeting dengan Bappenas dan Kemenkeu tanggal 25 April dan 9 Mei 2018, KPK mengajukan penambahan anggaran karena kurangnya alokasi anggaran.
- Alokasi:
 - Belanja operasional – Belanja Pegawai (asumsi tidak ada rekrutmen pegawai atau *zero growth* di tahun 2018)
 - Belanja operasional – non Belanja Pegawai (Layanan dasar seperti langganan daya dan jasa, pemeliharaan gedung dan peralatan, Operasional IT)
 - Belanja Non Operasional untuk memenuhi kekurangan anggaran pada program Pemberantasan Tipikor (termasuk peningkatan Target Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan TPK menjadi masing-masing 200 Perkara)
- KPK menyampaikan usulan Penambahan Anggaran TA. 2019 sebesar Rp. 171.85 M
 - Belanja Operasional Belanja Pegawai sebesar Rp. 72,74 M yang dialokasikan untuk :
 - Dampak tambahan pegawai baru pada tahun 2017 sekitar 484 orang
 - Pergeseran kompetensi pegawai sesuai dengan kebutuhan sesuai prinsip *zero growth* (tanpa rekrutmen 2018-2019)
 - Belanja Operasional Non Belanja Pegawai sebesar Rp. 20,43 M yang dialokasikan untuk Kebutuhan layanan dasar perkantoran seperti Langganan daya dan jasa (Listrik/internet), pemeliharaan gedung dan peralatan, operasional kendaraan, pemeliharaan Hardware,software, dan perpanjangan lisensi IT. Bahwa alokasi yang ada hanya cukup untuk 8 bulan saja
 - Belanja Non Operasional sebesar Rp. 78,68 Milyar yang dialokasikan untuk :
 - memenuhi kekurangan anggaran pada program Pemberantasan Tipikor
 - Peningkatan Target Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan TPK menjadi masing-masing 200 Perkara

3. Beberapa hal lainnya yang menjadi pokok-pokok pembahasan, diantaranya sebagai berikut :

- Bahwa Polri dan KPK adalah penegak hukum yang ikut mengawasi penggunaan anggaran maka anggarannya harus di dukung. Bahwa yang akan memutuskan adalah Badan Anggaran
- Bahwa usulan tambahan semua mitra sebesar Rp. 57 Trilyun sehingga tidak mungkin semua dipenuhi.
- Untuk Polri, apakah dari usulan tambahan tersebut ada yang bisa dikurangi, kegiatan mana saja yang merupakan kegiatan prioritas untuk diperjuangkan tambahan anggarannya.
- Bahwa KPK meminta tambahan Rp.171 milyar yang salah satunya untuk rekrutmen pegawai sehingga jika tidak dipenuhi, di khawatirkan tidak mampu menggaji pegawai, dan prihatin dengan penurunan anggaran Polri.
- Apakah dari Rp.44,4 Trilyun yang dimintakan tambahan, berapa kebutuhan yang riil sebenarnya yang sangat urgent buat Polri untuk dipenuhi.

- Bahwa Komisi III DPR RI mendukung semua anggaran mitra, bahwa kepolisian mempunyai beban kerja yang berat dan luas dan berharap permintaan anggarannya untuk bisa dipenuhi.
 - Berharap KPK mendapat anggaran yang memadai. Bahwa anggaran untuk pencegahan belum memadai, berharap KPK memberikan porsi yang lebih besar untuk pencegahan.
 - Merasa prihatin dengan sistem anggaran di Indonesia dimana pemberian fee kepada kepala daerah telah menjadi rahasia umum.
 - Meminta penjelasan Polri terkait dengan pembangunan Kantor Polres di Pidie Jaya. Soal pengadaan pesawat terbang untuk Kapolri, bahwa pesawat yang sudah ada sudah tidak layak, berharap agar pesawat untuk Kapolri bisa dianggarkan. Bagaimana dengan rumah dinas Polri yang memprihatinkan
 - Berharap jika ada kegiatan sosialisasi baik di Polri maupun di KPK agar bisa mengikutsertakan anggota Komisi III DPR RI.
4. Beberapa hal lainnya yang disampaikan oleh Pimpinan KPK dan Polri, diantaranya adalah sebagai berikut :
- Pimpinan KPK menyampaikan bahwa KPK mensinergikan upaya pencegahan dan penindakan, agar daerah-daerah yang kepala daerahnya kena OTT menjadi prioritas untuk pencegahan. Bahwa 80% pegawai baru akan di alokasikan di deputy penindakan untuk menyelesaikan tunggakan perkara di KPK.
 - Asrena Polri menyampaikan bahwa Polri mengusulkan tambahan anggaran yang besar karena akan menghadapi Pileg dan Pilpres serta untuk penguatan Densus, diharapkan agar tambahan Rp. 44,4 Trilyun ini bisa dipenuhi.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.45 WIB

